

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah bagian terkecil dari sebuah negara yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga secara langsung berperan dalam memenuhi kebutuhan mereka agar bisa hidup lebih sejahtera. Berdasarkan Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014), desa diartikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan berwenang mengelola serta mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan ini didasarkan pada inisiatif masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai perpanjangan tangan negara, desa mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan pembangunan, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga desa secara maksimal.

Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menggerakkan perekonomian desa melalui pengembangan kewirausahaan di tingkat desa, karena kewirausahaan tersebut berperan sebagai strategi penting untuk mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Riyanti & Adinugraha, 2021). Dari sudut pandang sosiologi, keberadaan lembaga ekonomi yang diorganisasi dan dijalankan secara mandiri oleh warga desa telah selaras dengan kebutuhan dan kepentingan bersama masyarakat setempat. Kehadiran lembaga

semacam ini searah dengan tujuan peningkatan kemandirian dan kreatifitas masyarakat desa untuk mengusahakan kesejahteraannya. Pendirian dan pengelolaan BUMDes yang kurang baik secara langsung dapat kontraproduktif dengan tujuan pembentukan BUMDes itu sendiri (Iskandar et al., 2021). Kewirausahaan di tingkat desa bisa dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat setempat. BUMDes sendiri merupakan sebuah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar berasal dari desa, berupa kekayaan desa yang dipisahkan khusus untuk mengelola aset, memberikan layanan, dan menjalankan berbagai usaha demi meningkatkan kesejahteraan warga desa secara maksimal (UU Nomor 32 Tahun 2004). Pemerintah juga semakin memperkuat peran ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur pemanfaatan sumber daya serta menentukan arah pembangunan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi desa untuk memiliki otonomi dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya ekonominya secara mandiri. BUMDes tidak hanya menjadi instrumen ekonomi desa, tetapi juga sarana transformasi sosial yang mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Desiwantara, 2024)

Desa memiliki sistem pemerintahan sendiri untuk mengelola wilayahnya, di mana tata kelola wilayah dijalankan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kedua lembaga ini bertanggung jawab dalam mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat. Hal ini

dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan kebiasaan yang dihormati dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suparji, 2019).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi perdesaan di Indonesia. Namun, implementasinya sering menghadapi berbagai tantangan, seperti kerancuan peran antara institusi sosial dan komersial, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai pengelolaan BUMDes, serta masalah kepemimpinan dan manajerial (Jayadi et al., 2024). Di tingkat nasional, permasalahan ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan BUMDes secara efektif. Kurangnya perencanaan bisnis yang matang dan pengembangan potensi desa menjadi titik lemah yang signifikan. Pengelolaan BUMDes sering kali belum mampu mengembangkan sumber daya khas desa menjadi usaha produktif yang berkelanjutan (Inapty et al., 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk sebagai langkah strategis dalam rangka memperkuat struktur ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes memiliki fungsi ganda sebagai lembaga ekonomi dan sosial yang bertugas menyediakan layanan kepada masyarakat sekaligus memperoleh keuntungan melalui unit-unit usaha desa yang berbasis pada kekayaan sumber daya alam, budaya, dan potensi lokal lainnya. BUMDes adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum, dibentuk untuk mengelola potensi ekonomi desa secara kolektif demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta

Pendapatan Asli Desa (PAD) (Purnomo, H. (2016). Tujuan utama dibentuknya BUMDes adalah untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat desa, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) guna membiayai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, BUMDes juga diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi desa yang mampu mendorong kemandirian desa dalam kerangka pembangunan nasional (Dharma et al., 2023).

BUMDes berperan penting dalam memperkuat kapasitas ekonomi desa karena mampu mengembangkan usaha yang berbasis kebutuhan dan potensi masyarakat lokal secara partisipatif dan transparan (Ismowati et al., 2022). Strategi pengembangan BUMDes harus diarahkan pada penguatan kelembagaan, profesionalisme pengelolaan, dan inovasi usaha agar berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Iskandar et al., 2021). Dengan demikian, keberadaan BUMDes tidak hanya menjadi instrumen penggerak ekonomi lokal, tetapi juga simbol kemandirian dan kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya secara efisien dan produktif.

Pembentukan BUMDes di atur pada Peraturan Pemerintah Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) No. 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan serta pembubaran BUMDes yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian desa (Kementrian Desa PDTT). BUMDes dibentuk oleh pemerintah desa yang kemudian dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa (Suwarno et al., 2023)

BUMDes Desa Busung didirikan pada tanggal 4 Agustus 2016. Wisata Gurun Telaga Biru peraturan kepala Desa Busung Nomor 04 Tahun 2024 tentang pengelolaan Desa Wisata. BUMDes ini bertujuan menguatkan ekonomi desa. Desa Busung, yang terletak di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dikenal sebagai desa yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya alam yang melimpah. Para pihak terkait perlu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki desa ini sebagai modal utama untuk mendorong pembangunan yang merata. Agar kehidupan masyarakat di desa ini bisa meningkat, dibutuhkan langkah-langkah yang sistematis dan terencana dengan baik. Salah satu cara untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan warga adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (Iskandar et al., 2021).

Desa Busung, yang terletak di Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, pernah mengalami masa sulit akibat konflik lahan antara masyarakat dengan PT. Surya Bangun Pertiwi (SBP), sebuah perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut. Persoalan ini muncul karena adanya klaim lahan dari kedua belah pihak, di mana masyarakat merasa tanah mereka dibeli tanpa proses yang transparan, sementara perusahaan mengklaim sudah memiliki hak atas lahan tersebut.

Masalah semakin rumit ketika janji ganti rugi berupa perumahan tidak sesuai harapan warga. Banyak dari mereka merasa kehilangan hak atas tanah tanpa mendapatkan pengganti yang sepadan. Konflik ini akhirnya memicu berbagai bentuk perlawanan, termasuk pelaporan ke lembaga hukum. Namun, setelah proses panjang, PT. SBP menyerahkan sertifikat tanah dan lahan pengganti kepada ratusan

keluarga sebagai bentuk penyelesaian. Hal ini menjadi titik balik yang membawa kepercayaan kembali ke tengah masyarakat.

Masyarakat Desa Busung tidak tinggal diam Di tengah pemulihan dari konflik tersebut. Mereka memilih untuk bangkit dan memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya, khususnya kawasan bekas tambang yang kini dikenal sebagai Gurun Pasir dan Telaga Biru. Transformasi kawasan ini menjadi destinasi wisata yang ramai dikunjungi menjadi langkah nyata menuju pembangunan desa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Proses ini, peran BUMDes "Dendang Bertuah" sangat penting. BUMDes menjadi ujung tombak dalam mengelola sektor wisata secara profesional namun tetap berpihak pada masyarakat. Mereka mengelola fasilitas-fasilitas seperti tempat parkir, penyewaan wahana, spot foto, dan warung makan, sekaligus memberdayakan warga setempat sebagai pelaku usaha. BUMDes juga menjembatani kerja sama dengan pihak luar, termasuk pemerintah daerah dan pelaku pariwisata lainnya, untuk meningkatkan kualitas dan promosi destinasi wisata tersebut. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan memastikan bahwa pengelolaan dilakukan secara transparan, BUMDes Desa Busung tidak hanya menciptakan sumber pendapatan baru bagi desa, tetapi juga memberi lapangan kerja baru untuk masyarakat dan juga memperkuat rasa kepemilikan dan kebanggaan warga terhadap desanya sendiri. Ini sejalan dengan semangat wisata berkelanjutan, yaitu wisata yang ramah lingkungan, berpihak pada masyarakat lokal, dan memiliki dampak jangka panjang yang positif.

Berdasarkan dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) pada tahun 2024 jumlah BUMDes dalam skala Nasional terdapat 54.886 BUM Desa dan 5.889 BUM Desa Bersama total keseluruhan BUM Desa secara Nasional adalah 60.775 BUM Desa. Sedangkan dalam skala Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari lima kabupaten yaitu Bintan, Anambas, Natuna, Lingga, Karimun memiliki jumlah 230 BUM Desa dan 47 BUM Desa Bersama total keseluruhan BUM Desa di Provinsi Kepulauan Riau adalah 277 BUM Desa. Dalam skala Kabupaten Bintan memiliki jumlah 32 BUM Desa dan 9 BUM Desa Bersama total keseluruhan BUM Desa di Kabupaten Bintan adalah 277 BUM Desa.

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah administratif dari 7 kabupaten/kota yang ada yang berada di Provinsi kepulauan riau. Berdasarkan data dari Dinas PMD Kabupaten Bintan pada tahun 2023 kabupaten Bintan memiliki 10 Kecamatan, 15 Kelurahan, 36 Desa, dan 36 BUMDes. Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan, terdapat 9 wilayah BUMDes yang tergolong aktif dalam menjalankan usahanya. Masing-masing daerah memiliki beberapa unit usaha dengan keunggulan masing-masing. Sebagian telah tergolong sebagai BUMDes perintis, pemula, berkembang, dan maju (Alamsyahbana et al., 2022). Adapun klasifikasi data jumlah 36 BUMDes di Kabupaten Bintan melalui tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data Jumlah BUMDes di Kabupaten Bintan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)				
No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Status
1.	Gunung Kijang	Gunung Kijang	Gemilang	Pemula
2.	Gunung Kijang	Malang Rapat	Sahabat	Perintis

3.	Gunung Kijang	Teluk Bakau	Bina Sejahtera	Maju
4.	Bintan Utara	Lancang Kuning	Jaya Gemilang	Berkembang
5.	Teluk Bintan	Bintan Buyu	Tri Mufakat Bentan	Berkembang
6.	Teluk Bintan	Pangkil	Mitra Bahari	Perintis
7.	Teluk Bintan	Penaga	Penaga Maju Bersama	Berkembang
8.	Teluk Bintan	Pengujan	Maju Jaya	Berkembang
9.	Teluk Bintan	Tembeling	Bina Karya	Berkembang
10.	Tambelan	Batu Lepuk	Tunas Jaya	Perintis
11.	Tambelan	Kampung Hilir	Hilir Sehati	Maju
12.	Tambelan	Kampung Melayu	Maju Melayu	Berkembang
13.	Tambelan	Pulau Pinang	Sejiwa	Perintis
14.	Tambelan	Kukup	Harapan Kita	Perintis
15.	Tambelan	Mentebung	Bangkit Kembali	Pemula
16.	Tambelan	Pulau Pengikik	Perjuangan Jaya	Perintis
17.	Telok Sebong	Berakit	Maju Bersama	Berkembang
18.	Telok Sebong	Ekanh Anculai	Anugrah Ekanh	Maju
19.	Telok Sebong	Pengudang	Pengudang Jaya	Berkembang
20.	Telok Sebong	Sebong Lagoi	Bina Bersama	Perintis
21.	Telok Sebong	Sebong Perih	Gemilang	Pemula
22.	Telok Sebong	Sri Bintan	Bintan Lestari	Perintis
23.	Toapaya	Toapaya	Jaya Sukses Gemilang	Berkembang
24.	Toapaya	Toapaya Utara	Bhakti Karya	Berkembang
25.	Toapaya	Toapaya Selatan	Mitra Karya Sejahtera	Berkembang
26.	Mantang	Dendun	Maju Bersama	Berkembang
27.	Mantang	Mantang Lama	Karya Bersama	Pemula
28.	Mantang	Mantang Baru	Mantang Baru	Perintis
29.	Mantang	Mantang Besar	Mantang Sejahtera	Pemula
30.	Bintan Pesisir	Kelong	Layar Bertuah	Perintis
31.	Bintan Pesisir	Mapur	Mapur Mandiri	Perintis
32.	Bintan Pesisir	Numbing	Kurnia Jaya	Perintis
33.	Bintan Pesisir	Air Gelubi	Alang Bertuah	Berkembang
34.	Seri Kuala Lobam	Busung	Dendang Bertuah	Maju
35.	Seri Kuala Lobam	Teluk Sasah	Mitra Perdana	Maju
36.	Seri Kuala Lobam	Kuala Sempang	Seri Kuala Raya	Perintis

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Bintan, 2024

Tabel 1. 2 Status BUMDes Maju di Kabupaten Bintan 2024

No	Nama Desa	Nama BUMDes	Status BUMDes
1	Ekang Anculai	Anugrah Ekang	Maju
2	Teluk sasah	Mitra Perdana	Maju
3	Kampung Hilir	Hilir Sehati	Maju
4	Busung	Dendang Bertuah	Maju
5	Teluk Bakau	Bina Sejahtera	Maju

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan data dari Dinas PMD Kabupaten Bintan 2024 terdapat lima BUMDes yang berstatus maju dan mampu menghasilkan PADes yaitu Desa Ekang Anculai (BUMDes Anugrah Ekang), Desa Teluk Sasah (BUMDes Mitra Perdana), Desa Kampung Hilir (Hilir Sehati), Desa Busung (Dendang Bertuah) dan Desa Teluk Bakau (Bina Sejahtera). Kelima BUMDes tersebut maju karena adanya kolaborasi antara aktor Pemerintah Desa, Mitra atau swasta, Masyarakat atau Pelaku Usaha (UMKM)

BUMDes Desa Busung menjadi salah satu aktor penting dalam pembangunan ekonomi desa. Secara bertahap menunjukkan perannya dalam meningkatkan PADes melalui pengelolaan unit usaha berbasis potensi lokal. Adapun klasifikasi data rekap PADes BUMDes Desa Bersama tahun 2023 dan 2024 melalui tabel berikut

Tabel 1. 3 Rekap PADes BUM Desa Bersama tahun 2023 dan 2024

No	KECAMATAN		DESA	NAMA BUMDes	PADes 2023	PADes 2024
1	TELUK BINTAN	1	Tambeling	Bina Karya	1,477,830	1,255,200
		2	Pengujan	Karya Bersama	2,872,542	-
		3	Bintan Buyu	Tri Mufakat Bintan	1,172,700	2,380,000
		4	Pangkil	Mitra Bahari	-	-
		5	Penaga	Penaga Maju Bersama	-	-
2	BINTAN UTARA	1	Lancang Kuning	Jaya Gemilang	5,498,375	-

3	TELUK SEBONG	1	Ekang Anculai	Anugrah Ekang	34,055,040	32,501,200
		2	Berakit	Maju Bersama	-	3,969,000
		3	Sebong Lagoi	Bina Bersama	-	-
		4	Sebong Perih	Sebong perih Gemilang	-	-
		5	Pengudang	Pengudang Jaya	-	-
		6	Sri Bintan	Bintan Lestari	-	-
4	SERI KUALA LOBAM	1	Teluk sasah	Mitra Perdana	12,142,793	36,635,250
		2	Kuala Sempang	Seri Kuala Raya	-	-
		3	Busung	Dendang Bertuah	12,694,200	26,342,500
5	GUNUNG KIJANG	1	Malang Rapat	Sahabat	-	-
		2	Teluk Bakau	Bina Sejahtera	9,264,691,90	24,154,559,00
		3	Gunung Kijang	Gemilang	5,698,750	-
6	MANTANG	1	Mantang Lama	Karya Bersama	-	-
		2	Mantang Baru	Mantang Baru	-	-
		3	Mantang Besar	Mantang Sejahtera	-	-
		4	Dendun	Maju Bersama	-	-
7	BINTAN PESISIR	1	Numbing	Kurnia Jaya	-	-
		2	Kelong	Layar Bertuah	2,630,568	-
		3	Mapur	Mapur Mandiri	-	-
		4	Air Glubi	Maritim Jaya	-	-
8	TOAPAYA	1	Toapaya Selatan	Mitra Karya Sejahtera	20,212,280	34,092,027
		2	Toapaya	Sukses Jaya Gemilang	-	-
		3	Toapaya Utara	Bhakti Karya	4,882,000	-
9	TAMBELAN	1	Kampung Hilir	Sehati	23,000,000	32,701,732
		2	Pulau Pinang	Sejiwa	-	-
		3	Kukup	Harapan Kita	-	-
		4	Batu Lepuk	Tunas Jaya	-	-
		5	Mentebung	Bangkit Kembali	-	-
		6	Kampung Melayu	Maju Melayu	-	-
		7	Pulau Penggikik	Perjuangan Jaya	6,080,730	8,906,211
				TOTAL	141,682,500	182,603,179

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Bintan 2024

Berdasarkan rekapitulasi data PADes 2024, BUMDes Dendang Bertuah Desa Busung mencatat kontribusi sebesar Rp 26.342.500 ke kas desa. Nilai ini

menunjukkan adanya peran aktif BUMDes dalam mendukung kemandirian ekonomi desa melalui usaha usaha yang di kelola secara profesional dan partisipatif. Partisipasi BUMDes Dendang Bertuah dalam menyumbang data PADes juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola desa. Data tersebut menjadi acuan untuk meneliti lebih dalam strategi yang diterapkan BUMDes Dendang Bertuah dalam mengelola potensi desa agar dapat terus memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan PADes dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. 4 Rekap BUMDes Bergerak di Sektor Pariwisata

NO	NAMA DESA	NAMA BUMDES
1	Pengudang	Pengudang Jaya
2	Busung	Dendang Bertuah
3	Kampung Hilir	Hilir Sehati
4	Malang Rapat	Sahabat
5	Ekan Aculai	Anugrah Ekan
6	Teluk Bakau	Bina Sejahtera

Sumber: Olahan Peneliti, 2025

Berdasarkan rekap BUMDes yang bergerak di sektor wisata ada empat Desa yang bergerak di sektor pariwisata yaitu, desa Pengudang, Busung, Kampung Hilir, Malang Rapat, Ekan Aculai dan Teluk Bakau.

Wisata berkelanjutan adalah konsep pengembangan pariwisata yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial budaya masyarakat lokal. Tujuan utama dari pariwisata berkelanjutan adalah memastikan bahwa aktivitas pariwisata tidak merusak sumber daya alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat (World Tourism Organization, 2005). Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam

perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam pembangunan pariwisata. Dengan demikian, pariwisata berkelanjutan berupaya menciptakan harmoni antara kebutuhan wisatawan, pelaku industri pariwisata, masyarakat lokal, dan lingkungan.

Beberapa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Bintan telah mengembangkan sektor pariwisata dengan pendekatan berkelanjutan. Salah satunya adalah BUMDes Desa Pengudang, yang mengelola kawasan ekowisata berbasis konservasi mangrove dan laut. Melalui pelibatan masyarakat lokal dalam menjaga lingkungan dan menawarkan wisata edukatif, desa ini menjadi contoh pengembangan wisata yang memperhatikan aspek pelestarian alam. Selanjutnya, BUMDes Desa Busung menjadi pengelola utama destinasi Gurun Pasir dan Telaga Biru, yang setiap harinya mampu menarik ribuan wisatawan. Strategi pengelolaan wisata yang diterapkan mencakup penyediaan fasilitas, pengelolaan kebersihan, dan pemanfaatan potensi lokal untuk mendukung perekonomian warga. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lanskap alam buatan yang menjadi daya tarik utama. Di Desa Kampung Hilir yang berada di Pulau Tambelan, BUMDes bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan homestay berbasis komunitas. Model ini tidak hanya menawarkan pengalaman tinggal di rumah warga, tetapi juga mengangkat budaya lokal sebagai bagian dari daya tarik wisata yang ramah lingkungan dan inklusif. Kemudian, BUMDes Desa Malang Rapat mendukung inisiatif generasi muda untuk mengelola objek wisata bahari "Bintan Penyusuk". Melalui promosi digital dan pendekatan konservasi pesisir,

desa ini mulai dikenal sebagai tujuan wisata bahari yang menjaga nilai-nilai lokal dan lingkungan. Sementara itu, BUMDes E kang Anculai menjalankan kombinasi unit usaha antara peternakan, sewa alat kegiatan, dan jasa wisata. Diversifikasi ini memungkinkan desa untuk mengembangkan potensi ekonomi tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan. Terakhir, BUMDes Kampung Hilir dan Teluk Bakau aktif mengembangkan layanan penunjang wisata seperti persewaan tenda, catering, warung kopi, dan keramba kerapu. Model ini menciptakan ekosistem ekonomi desa yang mandiri dan memberdayakan masyarakat sekitar. Secara umum, desa-desa tersebut telah berhasil memadukan potensi alam, budaya, dan partisipasi masyarakat ke dalam sistem pengelolaan wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga lingkungan dan keberlanjutan sosial jangka panjang.

BUMDes Desa Busung memiliki sejumlah keunggulan yang membedakannya dari BUMDes-BUMDes lain di Kabupaten Bintan yang juga bergerak di sektor pariwisata. Salah satu perbedaan utamanya adalah daya tarik wisata alam buatan berupa padang pasir dan Telaga Biru yang terbentuk dari bekas galian tambang pasir. Daya tarik ini sangat unik dan belum dimiliki oleh desa wisata lainnya, yang pada umumnya mengandalkan potensi wisata alami seperti hutan mangrove di Desa Pengudang atau wisata bahari di Desa Malang Rapat.

Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan ke Desa Busung tergolong sangat tinggi, mencapai 1.000 hingga 2.000 orang per hari, terutama pada akhir pekan dan musim libur. Angka ini jauh melampaui desa-desa wisata lainnya yang kunjungannya lebih terbatas karena letak geografis yang terpencil atau aksesibilitas

yang belum optimal. Letak strategis Desa Busung yang berada di jalur utama antara Tanjungpinang dan Tanjung Uban menjadi faktor pendukung tingginya arus kunjungan wisatawan.

Keunggulan lainnya adalah kekuatan visual dari lokasi wisata Gurun Pasir dan Telaga Biru yang sangat menarik bagi wisatawan untuk berfoto dan membuat konten media sosial. Hal ini menjadikan wisata Busung sebagai destinasi yang "*Instagrammable*" dan sangat populer di kalangan generasi muda. Berbeda dengan desa lain yang fokus pada wisata edukatif atau konservasi, Desa Busung lebih menonjolkan sisi estetika dan pengalaman visual yang unik.

BUMDes Busung juga berhasil mengoptimalkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata melalui berbagai unit usaha, seperti penyewaan tenda, jasa foto, warung makan, hingga pengelolaan parkir. Keterlibatan masyarakat secara langsung dalam kegiatan ekonomi wisata ini menunjukkan keberhasilan strategi pemberdayaan yang belum banyak diterapkan secara luas di desa wisata lain. Perbedaan utama BUMDes Busung terletak pada inovasi pengelolaan lahan bekas tambang, daya tarik visual wisata, volume kunjungan yang tinggi, kemudahan akses, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam unit usaha wisata secara langsung.

Pengelolaan wisata berkelanjutan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dendang Betuah di Gurun Telaga Biru Desa Busung telah mengusung konsep keberlanjutan dengan memanfaatkan lahan bekas tambang menunjukkan peran strategi BUMDes dalam memanfaatkan potensi lokal untuk meningkatkan perekonomian desa. BUMDes Desa Busung telah memenuhi kebutuhan sumber

daya manusia (SDM) yang di perlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola potensi wisata desa (Mislaili et al., 2019). BUMDes Desa Busung juga mengadakan pelatihan belajar bahasa *inggris* dan mengenal bagaimana mengelola wisata yang baik agar terus berjalan dan tetap menjaga kelestarian dan tidak menambah rusak pada alam sekitar yang di adakan untuk kelompok masyarakat yang berkerja di wisata gurun pasir telaga biru. Mereka juga mempromosikan melalui media soisal yaitu *instragram* dan juga memiliki kerjasama dengan hotel-hotel salah satunya hotel Badra dan juga bekerjasama *to and travel* membawa wisatawan untuk berkunjung di wisata gurun pasir telaga biru, tidak hanya dari masyarakat lokal namum sampai ke manca negara. Wisatawan yang datang bisa diperkirakan dua sampai tiga ratus orang pada hari weekend saja, pada hari biasa bisa tidak ramai yang berkunjung, bisa dikatakan dalam satu minggu hampir empat ratusan orang yang berkunjung. Maka penting untuk diteliti bagaimana strategi yang dilakukan untuk pengelolaan destinasi wisata menuju wisata berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu: Bagaimana Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Busung Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan 2024?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun maksud dari tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui apa strategi yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Busung dalam pengelolaan wisata berkelanjutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan kontribusi besar dalam memperluas wawasan peneliti, terutama dalam proses penyusunan karya ilmiah seperti skripsi. Peneliti memperoleh banyak pemahaman baru yang tidak hanya diperoleh melalui pelajaran di kelas saja.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memberikan informasi sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Diharapkan ke depan pemerintah bisa menjalankan peranannya sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya.